

# **RISET EVALUASI PROGRAM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN STUNTING PADA KABUPATEN PRIORITAS**

Tim Peneliti

Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat

# LATAR BELAKANG

- Indonesia adalah negara dengan prevalensi *stunting* kelima terbesar di dunia
- Riskesdas : prevalensi *stunting* berturut turut dari tahun 2007, 2010, 2013, dan 2018 adalah 36,8%, 34,6% 37,2%, dan 30,8%. → kategori tinggi
- Kekurangan gizi kronis/berkepanjangan → terganggunya perkembangan sehingga pertumbuhan dan perkembangan tidak optimal → *Stunting*



Anak *stunting* berisiko mengalami penyakit degeneratif di usia dewasa



Berisiko pada menurunnya tingkat produktivitas



menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan memperlebar ketimpangan

# LATAR BELAKANG

- Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan dan regulasi yang berkontribusi dalam penanganan stunting:
  - Intervensi gizi spesifik → 30% penurunan stunting
  - intervensi gizi sensitive → 70% penurunan stunting
- Pengalaman internasional menunjukkan bahwa upaya penurunan masalah stunting membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan peran dari berbagai lintas sektoral.
- Pendekatan multisektor telah berhasil menurunkan angka stunting di negara Afrika sub-Shahara, Peru, Bolivia, dan India.

# LATAR BELAKANG

- Tahun 2017 melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang diketuai oleh Wakil Presiden RI telah dicanangkan program percepatan penanggulangan stunting di 100 kabupaten kota prioritas → Jumlah kabupaten kota prioritas akan terus bertambah hingga tahun 2021.
- Tim TNP2K melakukan rencana aksi nasional yang melibatkan berbagai sektor dari tingkat pemerintah pusat hingga daerah.
- Program ini diharapkan mampu mengintegrasikan seluruh program penanggulangan stunting baik yang sensitif maupun spesifik yang dilakukan oleh berbagai sektor pemangku kebijakan

# PERTANYAAN PENELITIAN

- Apakah kebijakan program percepatan penanggulangan stunting di kabupaten kota prioritas telah diimplementasikan oleh daerah dan dapat berjalan efektif?

# TUJUAN PENELITIAN

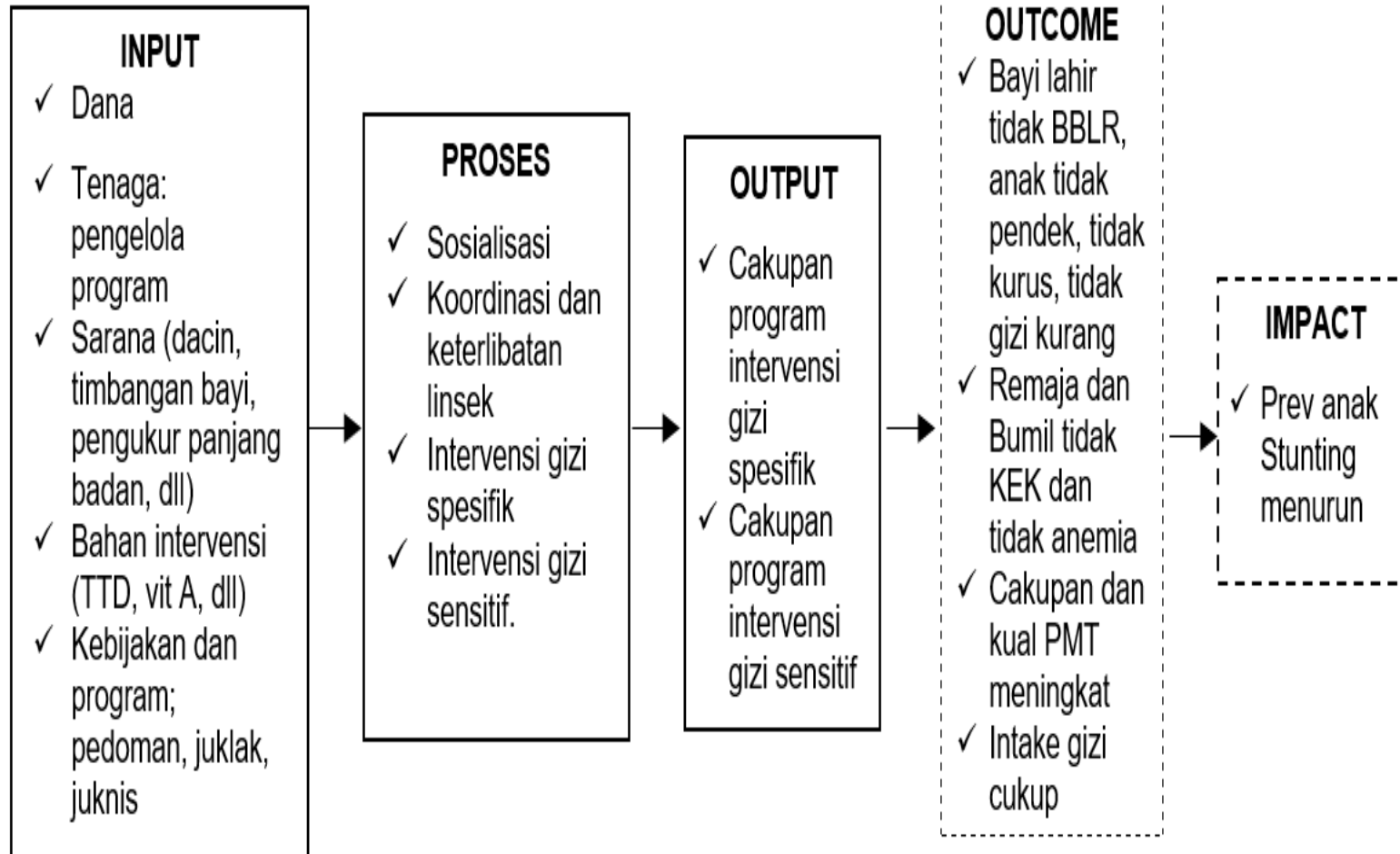
- Tujuan Umum

Melakukan evaluasi pelaksanaan “program percepatan penanggulangan stunting pada kabupaten prioritas.”

## Tujuan Khusus :

1. Melakukan evaluasi pada tahap **INPUT** untuk melihat implementasi kebijakan dan perencanaan (dana, tenaga, sarana, bahan, metode) program prioritas intervensi stunting.
2. Melakukan evaluasi pada tahap **PROSES** untuk melihat penggerakan dan pelaksanaan dimulai dari sosialisasi, kesesuaian dengan juknis, inovasi, dan monitoring evaluasi program.
3. Melakukan evaluasi pada tahap **OUTPUT** untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan program.
4. Menggali berbagai faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program percepatan penanggulangan stunting.

# KERANGKA KONSEP





# VARIABEL

- Variabel input (5M):
  - Tenaga: pengelola program (dokter, ahli gizi, bidan, kader, dll) dan tenaga pendukung program dari lintas sector (man)
  - Dana, anggaran (money)
  - Bahan intervensi: TTD, vit A, zink, calcium, PMT pemulihan, dll (material)
  - Kebijakan dan program; pedoman, juklak, juknis (method)
  - Sarana: dacin, timbangan bayi, pengukur panjang badan, buku KIA, dll (machine)

# VARIABEL

## Variabel proses:

- Sosialisasi
- Koordinasi dan keterlibatan lintas sektor
- Intervensi gizi spesifik
- Intervensi gizi sensitif

## Variabel output:

- Cakupan program intervensi gizi spesifik
- Cakupan program intervensi gizi sensitif

# TEMPAT PENELITIAN

- Dari 100 kab/kota prioritas percepatan penanggulangan stunting, dipilih 13 kabupaten prioritas

Regional Barat	Regional Tengah	Regional Timur
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rokan Hulu</li><li>2. Lampung Tengah</li><li>3. Cianjur</li><li>4. Tasikmalaya</li><li>5. Brebes</li><li>6. Pematang</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ketapang</li><li>2. Hulu Sungai Utara</li><li>3. Mamuju</li><li>4. Gorontalo</li><li>5. Lombok Tengah</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lanny jaya</li><li>2. Maluku Tengah</li></ol>

# WAKTU PENELITIAN

Lama penelitian 12 bulan (Januari s/d Desember 2019), mulai dari persiapan sampai dengan penyusunan laporan.

# DESAIN PENELITIAN

- Jenis penelitian operational research, untuk melihat implementasi “program percepatan penanggulangan stunting di 100 kabupaten prioritas” dengan pendekatan sistem (input - proses - output).
- Desain studi: *mixed methods*
- - Studi kualitatif : indepth interview, group interview
- - Studi kuantitatif: data sekunder, cross-sectional

# KUALITATIF

## ○ Informan di tingkat Provinsi:

1. Bappeda
2. Dinkes Provinsi
3. Dinas PU dan Tata ruang pemukiman

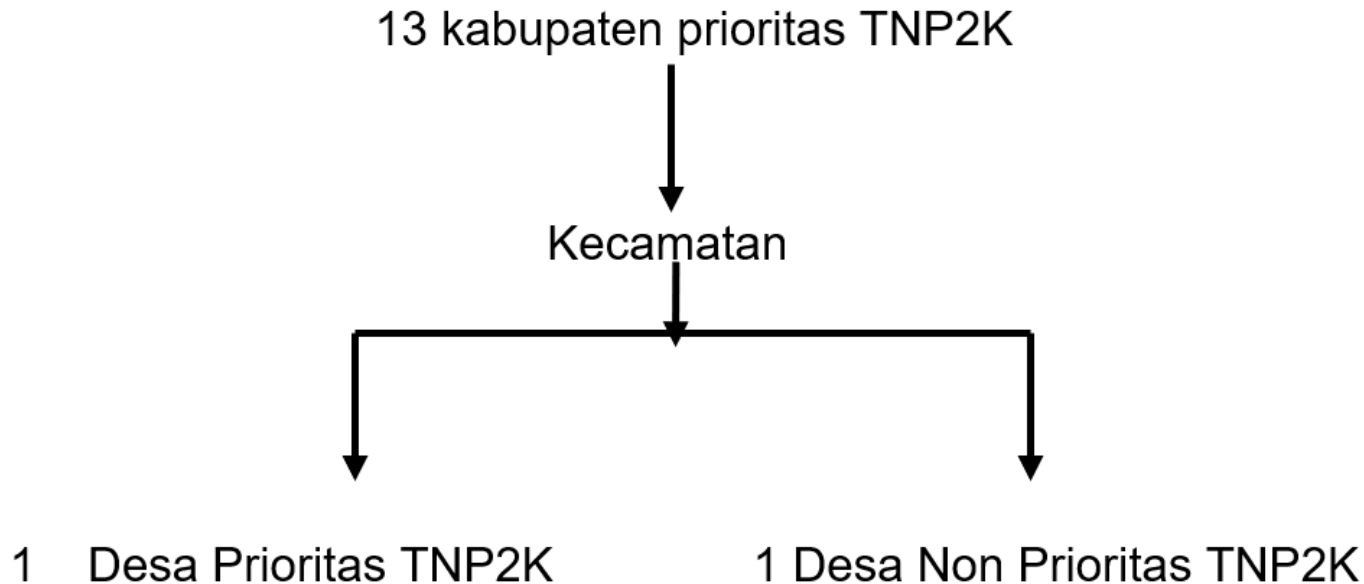
## ○ Informan di tingkat Kabupaten:

1. Bappeda
2. Pemerintah daerah bidang kesra
3. Dinas Kesehatan
4. Dinas PUPR
5. Dinas Sosial
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perlindungan Anak dan KB
7. Dinas Pertanian dan Dinas ketahanan pangan
8. Dinas pendidikan dan kebudayaan
9. Kantor Kementerian Agama Kabupaten

- Informan di tingkat Kecamatan:
  1. Puskesmas
  2. Camat
  3. PKK
  4. PLKB
  5. PPL
  6. PKH dan TKS
- Informan di tingkat Desa
  1. Kepala Desa
  2. Bidan desa
- Informan group interview:
  1. Tokoh masyarakat, Tokoh Agama (5 orang)
  2. Kader Posyandu (5 orang)
  3. Ibu hamil dan ibu menyusui (5 orang)

# KUANTITATIF

- Populasi: Desa di Kabupaten prioritas TNP2K
- Sampel: 2 Desa di 13 Kabupaten Prioritas TNP2K



- Total sampel balita: 90
- Untuk mendukung hasil evaluasi ini akan dilakukan pengukuran BB dan TB terhadap sampel balita di setiap desa sejumlah 90 balita untuk konfirmasi terhadap pelaksanaan program yang telah dilakukan di setiap desa



# INSTRUMEN PENELITIAN

- Kualitatif
  - Panduan wawancara untuk melakukan pengumpulan data dengan *indepth interview* dan Group Interview.
  - Indepth interview: pemegang program dan pelaksana dilapangan di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa
  - Group interview dilakukan di tingkat desa

# INSTRUMEN PENELITIAN

- **Kuantitatif**
  - Instrumen pengumpulan data kuantitatif berupa kuesioner terstruktur untuk mengetahui implementasi program terkait stunting di masyarakat yang dikumpulkan dengan cara wawancara
  - Alat ukur antropometri untuk mengukur status gizi balita.
  - Formulir data sekunder

# PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA

- **Pengumpulan data akan dilakukan dalam 2 tahap:**
  - 1. Pengumpulan data ke-1 selama 9 hari untuk mengumpulkan data kualitatif yaitu wawancara mendalam dengan pemegang program terkait program percepatan penanggulangan stunting dari mulai tingkat provinsi sampai dengan tingkat kecamatan.**
  - 2. Pengumpulan data ke-2 selama 10 hari untuk pengumpulan data kuantitatif pada 90 balita di 2 desa lokasi penelitian dan pengumpulan data kualitatif pada informan di desa.**

# SPESTIFIK: DINAS KESEHATAN

1. Peran Dinkes dalam Program penanggulangan stunting
2. Keberadaan regulasi (PP, perda, SK) mengenai pelaksanaan program penanggulangan stunting
  - a. Pelaksanaan penanggulangan stunting
  - b. Keterlibatan tenaga pelaksana
3. Program intervensi gizi spesifik terkait percepatan penanggulangan stunting
4. Upaya/inovasi untuk meningkatkan cakupan program-program tersebut
5. Perencanaan Program

- Sumber anggaran dari masing-masing program
- Pedoman terkait pelaksanaan program
- SDM (ketersediaan dan kapasitas SDM)
- Sosialisasi pelaksanaan program
- Koordinasi dengan lintas sektor dari mulai perencanaan dan pelaksanaan
- Sarana dan Prasarana
- Monev (bentuk dan frekuensi kegiatan)
- Sistem pencatatan dan pelaporan (bentuk dan frekuensi)
- Faktor pendorong dan penghambat
- Rencana Tindak Lanjut dari program tersebut

No	Program	Target	
<b>Bidang gizi kesga</b>			
	TTD remaja putri		
	TTD ibu hamil		
	Suplementasi kalsium bumil		
	Konsumsi garam beriodium		
	Pemberian Makanan Bayi Anak (PMBA)		
	Tatalaksana gizi buruk		
	PMT pemulihan anak kurus		

No	Program	Target	
	PMT bumil KEK		
	pemantauan tumbuh kembang/ Surveilens		
	Suplementasi vit A bayi balita		
	Vitamin A Ibu Nifas		
	IMD		
	ASI Eksklusif		
	PMT Lokal padat karya		
	ANC/ Pemeriksaan kehamilan		
	Manajemen Terpadu Balita Sakit		

No	Program	Target	
	<b>Penyakit Menular</b>		
	Zink pada anak Diare		
	Imunisasi		
	Malaria		
	HIV		
	Kecacingan		
	Zink pada anak Diare		
	Imunisasi		



No	Program	Target	
	<b>Promkes</b>		
	Promosi dan konseling menyusui		
	<b>Bidang Yankes</b>		
	Akses Jaminan Kesehatan		
	<b>Bidang Kesling</b>		
	Air Bersih		
	Sanitasi		
	Jamban		
	ODF		

# SENSITIF

1. Program/kegiatan terkait program penanggulangan stunting
2. Implementasi program:
  1. Sasaran
  2. Waktu pelaksanaan
  3. Koordinasi dengan lintas sector
  4. Rencana Tindak Lanjut
3. Monitoring dan evaluasi:
  1. Bentuk
  2. Frekuensi
  3. Bentuk laporan
4. Faktor pendorong dan penghambat

# DINAS PUPR

No	Program	Target nasional	Target kabupaten
	Penyediaan air minum yang aman (PAMSIMAS)	1000 desa di 100 kab/kota di Indonesia	10 desa prioritas
	Penyediaan sanitasi yang layak (PAMSIMAS)	1000 desa di 100 kab/kota di Indonesia	10 desa prioritas

# DINAS PERTANIAN

No	Program	Target nasional	Target kabupaten
	Program <b>#bekerja</b> (bedah kemiskinan rakyat sejahtera)	Pemberian bantuan bibit hewani dan tanaman serta sarana dan prasarananya kepada 400 ribu rumah tangga miskin termasuk di dalamnya target rumah tangga miskin di 10 lokasi desa stunting di masing-masing kabupaten/kota.	
	Kawasan Rumah Pangan Lestari	Termanfaatkannya lahan pekarangan	

# DINAS SOSIAL

No	Program	Target nasional	Target kabupaten
	Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)		
	bantuan uang tunai untuk keluarga miskin (PKH)		

# DINAS PMD-KB

No	Program	Target nasional	Target kabupaten
	Membentuk KPM (Kader Pembangunan Manusia)	Terbentuknya KPM pada setiap desa di 159 kabupaten/kota lokasi prioritas pencegahan stunting pada tahun 2019  Terselenggaranya pelatihan dasar bagi seluruh KPM di tahun 2019	
	Rembuk stunting Desa		
	Rumah Desa Sehat (RDS)	Seluruh desa prioritas	
	Padat Karya Tunai		

# DINAS PMD-KB

No	Program	Target nasional	Target kabupaten
	Kampung KB		
	Bina Keluarga Balita Holistik Terintegrasi (BKBHI)		
	Pendidikan kesehatan reproduksi remaja		

# DINAS PENDIDIKAN

No	Program	Target	
	Akses PAUD dan pemantauan tumbuh kembang anak		
	Promosi stimulasi anak usia dini		
	Penyediaan konseling kesehatan reproduksi		
	Penguatan peran UKS di setiap tingkat pendidikan		



# KANWIL AGAMA

No	Program	Target nasional	Target indikator
	Bimbingan perkawinan pra nikah		
	Bimbingan keluarga sakinah		

Indikator	Regional Barat	Regional Tengah	Regional Timur
<b>Komitmen Pimpinan (Regulasi sebagai payung hukum)</b>	<p>Ditingkat Provinsi, Peraturan Gubernur untuk Penanggulangan Stunting masih dalam proses pembuatan. (Riau, Jawa Barat dan Jawa Tengah). Khusus untuk Lampung karena pergantian Gubernur hingga saat ini SK/PerGub belum dibuat sama sekali.</p> <p>Ditingkat Kabupaten, Beberapa kabupaten telah memiliki peraturan daerah berupa Peraturan Bupati untuk percepatan penanggulangan stunting. e.g : PerBup Rokan Hulu No.24/2018 tentang Penurunan Kekurangan Gizi Kronis (Februari 2018); dan Kabupaten Tasikmalaya No.34/2018</p>	<p>Ditingkat Provinsi, Beberapa Provinsi telah memiliki SK Gubernur, e.g : Kalimantan Selatan melalui SK Gubernur no 188.44/107/KUM/2019 ; Provinsi Gorontalo melalui SK Gubernur no 149/11/IV/2018</p> <p>Aturan formalnya terintegrasi dengan SK Rencana Aksi Daerah untuk Pangan dan Gizi (RADPG), dan merasa tidak perlu membuat PerGub baru khusus untuk penanggulangan stunting antara lain Provinsi NTB.</p> <p>Ditingkat Kabupaten : Seluruh Kabupaten (Lombok Tengah, Hulu Sungai Utara, Gorontalo, dan Mamuju) telah memiliki SK Bupati atau Peraturan Bupati untuk percepatan penanggulangan stunting di kabupatennya.</p>	<p>Belum terdapat aturan formal baik ditingkat Provinsi maupun ditingkat Kabupaten (Maluku Tengah dan Lanny Jaya)</p>

Indikator	Regional Barat	Regional Tengah	Regional Timur
<p><b>Peran dan Kewenangan</b></p>	<p>Koordinator lintas sector baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten</p> <p>Bappeda mempunyai wewenang untuk mengevaluasi RPJMD dan RKPD Kab/kota sehingga bisa mensinkronkan program-program di tiap OPD</p> <p>Mewajibkan dan memonitoring pelaksanaan program/kegiatan OPD berkaitan dengan upaya pencegahan dan penurunan stunting di tahun 2020</p> <p>Sejak 2019 dan 2020, Rencana Kerja OPD ditingkat Provinsi dan Kabupaten harus sudah menysasar pada kabupaten dan desa lokus stunting, Bappeda Provinsi dan Kabupaten bertugas mengawal sinergi program di masing-masing OPD untuk memasukkan stunting sebagai indikator utama.</p>	<p>Koordinator lintas sector baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten</p> <p>Finding contextual: sebagai ketua POKJA penanggulangan stunting, untuk Lombok Tengah masih menjadi perdebatan hingga 23/07/2019 apakah kesra pemda atau bappeda sebagai koordinator.</p> <p>Bappeda mempunyai wewenang untuk mengevaluasi RPJMD dan RKPD Kab/kota sehingga bisa mensinkronkan program-program di tiap OPD</p> <p>Mewajibkan dan memonitoring pelaksanaan program/kegiatan OPD berkaitan dengan upaya pencegahan dan penurunan stunting di tahun 2020</p> <p>Sejak 2019 beberapa kegiatan di OPD sudah mulai dilakukan untuk menysasar pada desa lokus stunting karena sebagian besar daerah baru melakukan kegiatan rembuk stunting di tahun 2019 (Lombok Tengah, Mamuju, HSU). Kegiatan/program belum optimal menysasar desa prioritas stunting dan menggunakan peluang komunikasi interpersonal antar OPD dengan Bappeda untuk mulai menysasar beberapa desa prioritas penanggulangan stunting.</p> <p>Dan pada tahun 2020, Rencana Kerja OPD ditingkat Provinsi dan Kabupaten harus sudah menysasar pada kabupaten dan desa lokus stunting, Bappeda Provinsi dan Kabupaten bertugas mengawal sinergi program di masing-masing OPD untuk memasukkan stunting sebagai indikator utama rencana kerja tahun 2020.</p>	<p>Belum mengambil peran dan belum merasa memiliki kewenangan terkait program penanggulangan stunting.</p>

Indikator	Regional Barat	Regional Tengah	Regional Timur
<b>Rembuk Stunting</b>	<p>Beberapa kabupaten sudah melakukan rembuk stunting (Lampung Tengah, Tasikmalaya dan Cianjur). Namun untuk kabupaten/kota dibawah Provinsi Jawa Tengah, Provinsi tidak wajib mengadakan rembuk stunting, tapi sosialisasi terkait stunting sudah dilakukan. Meskipun tidak secara khusus melabeli kegiatan dengan istilah rembuk stunting tapi Bappeda Provinsi Jateng sudah menyampaikan informasi dan penekanan<sup>2</sup> terkait stunting dalam forum perencanaan pembangunan seperti dalam forum OPD, dalam pertemuan evaluasi RKPD yang semuanya dihadiri oleh lintas sektor</p>	<p>Sebagian besar kabupaten lokus penelitian telah melakukan pertemuan rembuk stunting di tahun 2018 akhir (Gorontalo) dan 2019 (Mamuju, Lombok Tengah)</p> <p>Dalam pelaksanaan rembuk stunting berbagai OPD diundang untuk menghadiri pertemuan tersebut antara lain BPMD, PUPR, Cipta Karya, DP3P2KB, Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian. Kegiatan diinisiasi oleh Dinas Kesehatan dan Bappeda Kabupaten.</p>	<p>Belum dilakukan (Maluku Tengah dan Lanny Jaya)</p>
<b>Koordinasi Lintas Sektor</b>	<p>Sebagian besar telah melakukan koordinasi, telah terbentuk saluran komunikasi baik melalui pertemuan maupun WA Group.</p>	<p>Sebagian besar telah melakukan koordinasi, telah terbentuk saluran komunikasi baik melalui pertemuan maupun WA Group.</p>	<p>Koordinasi belum terjadi, tetapi baru akan dilakukan dengan inisiasi Bappeda</p>

Indikator	Regional Barat	Regional Tengah	Regional Timur
<b>Sosialisasi Program Penanggulangan Stunting</b>	<p>Sebagian besar kabupaten telah terpapar isu stunting dan program nasional penanggulangan stunting. Namun ada beberapa OPD yang masih belum maksimal melaksanakan kegiatan sosialisasi program stunting dengan alasan keterbatasan anggaran</p>	<p>Sebagian besar kabupaten telah terpapar isu stunting dan program nasional penanggulangan stunting. Namun ada beberapa OPD yang masih belum maksimal melaksanakan kegiatan sosialisasi program stunting dengan alasan keterbatasan anggaran.</p>	<p>Kabupaten Maluku Tengah telah terpapar isu stunting dan program nasional penanggulangan stunting. Namun ada beberapa OPD yang masih belum maksimal melaksanakan kegiatan sosialisasi program stunting dengan alasan keterbatasan anggaran</p> <p>Kabupaten Lanny Jaya sebagian besar OPDnya tidak dan belum terpapar terkait program nasional penanggulangan stunting.</p>

# REGIONAL BARAT (SPESIFIK)

- ◉ Kampanye mulai gencar dilakukan dengan menggunakan multimedia di Jawa Barat dan Rokan Hulu
- ◉ Kabupaten sudah mulai melakukan inovasi dalam kegiatan terkait stunting, seperti posyandu stunting di Rokan Hulu, pemuatan software e-motivasi di Cianjur, dan Ayu Tingting di Pematang Siantar
- ◉ Koordinasi dengan lintas sektor sudah mulai berjalan.
- ◉ Lokus sesuai ditetapkan pusat, tetapi Cianjur sudah menambahkan 33 lokus menurut daerahnya dan Tasik sudah memulai untuk menetapkan. Sedangkan kabupaten lainnya belum
- ◉ Kegiatan khusus terkait dengan penanggulangan stunting yang ada di Dinkes belum ada. Tetapi ada beberapa inovasi yang secara tidak langsung dapat menurunkan prevalensi stunting antara lain pelatihan strategi komunikasi bagi tenaga promkes dan bidan, selain itu ada juga program e-motivasi yang bertujuan untuk meningkatkan level desa siaga

# REGIONAL TENGAH (SPESIFIK)

- ◉ Dinas kesehatan sdh fokus dlm program penurunan stunting walaupun tidak mengesampingkan program lainnya.
- ◉ Sosialisasi stunting dilakukan melalui beberapa media, seperti, melalui RADIO KOMUNITAS bekerja sama dengan kominfo
- ◉ Koordinasi dengan lintas sector sudah mulai dilakukan, utamanya di Gorontalo, koordinasi linsek sdh lebih duludilakukan. Walaupun pelaksanaannya masih ada tumpang tindih terutama di Dinas PUPR dan kesling Dinkes
- ◉ Setelah dilakukan PSG 2017 ternyata di luar daerah lokus stunting ditemukan angka stunting tinggi.
- ◉ Jumlah tenaga kesehatan yang masih belum merata dan belum memenuhi kebutuhan.
- ◉ Banyak dan seringnya “rotasi” tenaga kesehatan berakibat tidak bisa memaksimalkan pelaksanaan program

# REGIONAL TIMUR (SPESIFIK)

## Maluku:

- ◉ Dinkes Prov, merespon kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku, dengan menginisiasi sebuah gerakan inovatif berupa duta parenting yang dipelopori oleh istri gubernur.
- ◉ Kordinasi dan komunikasi lintas sektor dan program di OPD Kabupaten belum berjalan dengan baik.
- ◉ Dinas Kesehatan Provinsi mendorong Kab/kota untuk menggunakan dan meningkatkan pendekatan (yang sudah ada) gugus pulau (pengelempokan pulau-pulau berdasarkan kesamaan geografis, budaya dan sosek) dalam intervensi spesifik.
- ◉ Dinkes Kabupaten sedang dan telah melakukan kegiatan inovatif dalam pelayanan kesehatan, dan akan diimplementasikan juga untuk program penanggulangan stunting.
- ◉ Dinkes Kabupaten telah merespon rembuk Stunting di Pusat dengan mendorong Bupati dengan Surat Edaran yang berisi tupoksi setiap OPD yang fokus pada penanggulangan stunting.
- ◉ Dinkes Kabupaten mendorong Bupati untuk merumuskan SK Pokja Stunting, dimana draftnya sudah dibuat.



# REGIONAL TIMUR (SPESIFIK)

Lanny Jaya:

1. Dinkes baru mengetahui ditetapkan sebagai lokus pada Februari 2019. Sementara Sekda dan OPD lain sudah mengetahui sbelum nya dan sudah membuat sekretariat stunting. Sehingga mereka merasa program pada lokus adalah program sekda bukan program nasional. Karena mereka merasa tidak pernah mengusul dan merasa tdak ada stunting di wilayah mereka.
  2. Koordinasi lintas sektor (OPD) tidak berjalan baik; Ego sektoral (OPD) terkait implementasi program;
  3. Di puskesmas lokus sndiri tdak pernah melakukan pengukuran tinggi bdan balita krna tdak ada alat.
  4. Program PMT baik pusat maupun daerah diberikan tanpa melihat juknis krna diberikan kpada siapa saja yg hadir saat posyandu, baik bumil maupun balita.
- Belum ada kegiatan terkait stunting
  - Belum ada sosialisasi dari provinsi ke kabupaten
  - Sekretariat stunting sdh ada, tapi kegiatan blm ada

# SENSITIF

Regional Barat	Regional Tengah	Regional Timur
<p>Intervensi sudah dilakukan tetapi hanya berupa program rutin yang biasa dilakukan tetapi sudah mulai diarahkan ke daerah lokus stunting</p>	<p>Intervensi sudah dilakukan tetapi hanya berupa program rutin yang biasa dilakukan tetapi sudah mulai diarahkan ke daerah lokus stunting</p>	<p>Lany jaya → belum ada intervensi yang ditujukan ke lokus stunting</p> <p>Maluku Tengah → hanya sebagian OPD yang sudah mulai mengarahkan ke wilayah lokus stunting</p>

**TERIMA KASIH**